Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
Volume 7, Nomor 1, Maret 2026
ISSN 2721 - 4311
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP



Implementasi Perencanaan Sosial Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial Lansia di Indonesia

Hairani Siregar[1*], Kezia Amarya br Ginting[2], Salsa nabila[3], Fitri Novriawanti Harahap[4]
[1,2,3,4)] Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
*E-mail: hairani@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi perencanaan social untuk meningkatkan kualitas pelayanan social lansia di Indonesia. Peran praktik pekerjaan sosial di Indonesia semakin nyata dari waktu ke waktu melalui keterlibatannya dalam berbagai program penanganan persoalan sosial. Salah satu bentuk perwujudannya tampak pada keterlibatan pekerja sosial profesional sebagai pendamping dalam proses perencanaan sosial di bidang pelayanan masyarakat. Kajian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Temuannya menunjukkan bahwa perencanaan sosial dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan sosial bagi lansia. Dengan adanya pelayanan yang berlandaskan perencanaan sosial, kebutuhan para lansia diharapkan dapat terpenuhi secara lebih tepat dan sesuai dengan yang diperlukan.

Kata Kunci: Pelayanan Sosial Lansia, Praktek Perencanaan Sosial, Pekerja Sosial.

Abstract

This research discusses the implementation of social planning to improve the quality of social services for the elderly in Indonesia. The role of social work practice in Indonesia has become increasingly evident through its involvement in various programs addressing social issues. One manifestation of this is the involvement of professional social workers as facilitators in the social planning process in the field of community services. This study used a qualitative descriptive approach. The findings indicate that social planning can be a strategic step in improving the quality of social services for the elderly. With services based on social planning, it is hoped that the needs of the elderly can be met more precisely and appropriately.

Keywords*: Elderly Social Services, Social Planning Practice, Social Workers.*

Cara citasi : Siregar, Hairani. dkk. (2026) Implementasi Perencanaan Sosial Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial Lansia di Indonesia. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 7, No 1, Maret 2026*, 78-84.
DOI: https://doi.org/10.30596/jisp.v7i1.21964

Naskah diterima : 22-01-2025 **Revisi akhir :** 19-09-2025 **Disetujui :** 28-02-2026

Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2022, pada tahun 2030, sekitar satu dari enam orang di dunia akan berusia 60 tahun atau lebih. Populasi kelompok usia ini telah mengalami peningkatan Jumlah penduduk usia lanjut diperkirakan meningkat dari sekitar 1 miliar orang pada tahun 2020 menjadi 1,4 miliar orang.. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2050 jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas akan mencapai sekitar 2,1 miliar atau meningkat dua kali lipat. Seiring dengan semakin panjangnya harapan hidup, jumlah penduduk berusia 80 tahun ke atas juga diperkirakan meningkat tajam, bahkan jumlahnya diproyeksikan melonjak hingga tiga kali lipat dari tahun 2020 ke 2050, dengan estimasi mencapai kurang lebih 426 juta orang. (BPS, 2020).

Di Indonesia, sejak tahun 2021 kondisi demografi menunjukkan bahwa negara ini telah memasuki era penduduk menua, dengan proporsi lansia yang melampaui 10%. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, proporsi tersebut naik sebesar 3%, yakni dari 10,82% pada 2010 hingga 2021 (BPS, 2022). Kehidupan lansia kerap diwarnai berbagai tantangan, baik dari sisi sosial, kesehatan, maupun psikologis yang erat kaitannya dengan proses penuaan. Pergeseran peran keluarga dalam merawat lansia juga menjadi salah satu persoalan, sebab kesibukan pekerjaan, beban tanggung jawab yang berat, serta keterbatasan waktu sering kali membuat lansia tidak mendapatkan perhatian yang memadai hingga berisiko terlantar.

Praktik pekerjaan sosial di Indonesia semakin menunjukkan perannya melalui beragam program penanggulangan masalah sosial. Pengakuan atas kontribusi tersebut tercermin dari keterlibatan tenaga sosial profesional yang berperan sebagai pendamping dalam perencanaan pelayanan sosial. Pemerintah pun memberikan landasan hukum dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aturan ini diharapkan menjadi pedoman sekaligus menjamin terselenggaranya pelayanan yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pelayanan sosial sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu individu, kelompok, maupun masyarakat yang menghadapi persoalan sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mengatasi hambatan yang ada, sehingga kembali mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Bentuk pelayanan tersebut mencakup pemberian bantuan sosial, upaya rehabilitasi, perlindungan sosial, hingga pengembangan kapasitas sosial masyarakat (Suharto, 2020).

Pelayanan sosial pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Layanan tersebut merupakan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui penyediaan pelayanan sosial, masyarakat diharapkan dapat merasakan bahwa hak-hak mereka terpenuhi serta memperoleh manfaat nyata dari program yang dilaksanakan pemerintah. Seiring perkembangan, konsep pelayanan sosial mengalami perluasan dibandingkan dengan paradigma lama yang hanya berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut *Classification of the Functions of Government* (COFOG), pelayanan sosial kini juga mencakup perlindungan sosial berupa jaminan bagi lansia, penyandang disabilitas, keluarga, hingga pengangguran, serta layanan publik yang meliputi perumahan, rekreasi, dan budaya (United Nations, 2018).

Secara khusus, pelayanan sosial bagi lanjut usia mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, serta dukungan sosial, emosional, psikologis, dan finansial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia pada Pasal 7 menegaskan bahwa pelayanan di panti ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, serta pemenuhan kebutuhan dasar para lansia. Kelompok usia lanjut ini membutuhkan perhatian khusus agar tetap dapat menjaga kualitas hidup pada masa tuanya. Banyak lansia menghadapi tantangan serius, seperti kesepian, masalah kesehatan, hingga kompleksitas sosial yang membuat mereka rentan kehilangan harapan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perencanaan sosial yang matang guna mengkaji sekaligus mengarahkan pelayanan sosial bagi lansia agar dapat terlaksana secara optimal. Berangkat dari kondisi tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji implementasi perencanaan sosial sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan sosial lansia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terhadap obyek penelitian sehingga penelitian bisa menghasilkan hasil yang baik dan valid. Hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Sosial Lansia

Menurut Fahrudin (2018) mengutip Alfred J. Kahn bahwa pelayanan sosial mencakup program yang disediakan tanpa menggunakan mekanisme pasar, bertujuan memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, serta memfasilitasi kemampuan masyarakat dalam meraih pelayanan yang layak. Selain itu, Damanik (2019) memperluas perspektif ini dengan menekankan pelayanan sosial sebagai proses memproduksi, mendistribusikan, dan mengalokasikan sumber daya sosial berupa barang dan jasa kepada masyarakat rentan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kedua pendekatan tersebut mencerminkan pemahaman modern dalam dekade terakhir di Indonesia, di mana pelayanan sosial diharap efektif dalam menjembatani kesenjangan akses dan memperkuat fungsi sosial warga negara.

The Social Worker, pelayanan sosial dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pekerja sosial maupun profesi lain dengan tujuan utama membantu individu agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selaras Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia, bentuk pelayanan sosial yang diberikan di panti mencakup beberapa jenis layanan, antara lain:

1. Menyediakan hunian sesuai
2. Memberikan jaminan kebutuhan dasar, mencakup makanan, pakaian, serta layanan kesehatan
3. Menyelenggarakan kegiatan pengisi waktu luang, termasuk aktivitas rekreasi
4. Memberikan pembinaan yang mencakup aspek mental, sosial, keterampilan, dan keagamaan, serta
5. Pengurusan pemakaman atau sebutan lain.

Ada dua upaya pelayanan sosial bagi lansia yang berkembang di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Sosial Dalam Panti

   Pelayanan sosial jenis ini dilaksanakan melalui lembaga sosial dengan sistem pengasramaan, di mana penerima manfaat tinggal menetap di panti untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan.
2. Pelayanan Sosial Luar Panti

Pelayanan sosial ini dilakukan tanpa sistem pengasramaan, melainkan melalui dukungan keluarga maupun masyarakat sekitar, sehingga penerima manfaat tetap tinggal di rumah masing-masing sambil mendapatkan layanan yang diperlukan.

Lanjut usia merupakan tahap lanjut dan tahap akhir dari kehidupan seorang manusia, masa-masa dimana hanya tinggal penantian dan menunggu kepulangan ketempat kehidupan abadi yang sebenarnya ada. Pelayanan sosial lansia diberikan dengan tujuan agar lansia dapat menerima hak nya dengan baik dan mampu mempertahankan kehidupannya dengan sempurna, serta tercapainya kesejahteraan lansia.

Implementasi Perencanaan Sosial Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial Lansia di Indonesia

Perencanaan sosial merupakan sebuah proses untuk merencanakan program, layanan, dan kebijakan layanan sosial. Dalam konsep perencanaan sosial badan-badan pemerintah terlibat dalam tahapan pengembangan, penelitian, dan perencanaan skala besar untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Namun, badan-badan nirlaba, dewan-dewan perencanaan daerah, dan kelompok-kelompok masyarakat juga harus bisa merencanakan layanan dan program untuk mengatasi kebutuhan masyarakat. Istilah "perencanaan sosial" digunakan secara umum untuk menggambarkan perencanaan layanan-layanan sosial atau upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Perencanaan sosial juga disebut sebagai "perencanaan lingkungan" jika berlangsung di lingkungan masyarakat.

Dalam perkembangan dekade terakhir, keterlibatan pekerja sosial dalam perencanaan sosial semakin menekankan pada pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pekerja sosial tidak hanya berperan dalam merancang program di tingkat lembaga, tetapi juga menjadi fasilitator yang menghubungkan kepentingan individu, kelompok, dan komunitas dengan kebijakan publik. Perencanaan sosial modern dipandang sebagai bagian integral dari praktik pekerjaan sosial makro yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial secara sistemik, melalui penyusunan program, advokasi kebijakan, serta penguatan kapasitas komunitas (Thomas, 2017). Di Indonesia, praktik perencanaan sosial semakin diarahkan pada integrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai bentuk bantuan sosial, yang menjadi instrumen penting dalam mengatasi kerentanan masyarakat (Suharto, 2019). Dengan demikian, perencanaan sosial dewasa ini

dipahami bukan sekadar domain lembaga, melainkan juga strategi kolaboratif antara pekerja sosial, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya menyelesaikan masalah sosial secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Orang yang bertugas melakukan perencanaan sosial disebut perencana sosial, yaitu mereka yang berperan mengidentifikasi masalah sosial, mengumpulkan data, menganalisis kondisi masyarakat, serta merumuskan alternatif kebijakan atau program yang paling efektif. Dalam literatur mutakhir, perencanaan sosial dipahami sebagai proses sistematis yang mengintegrasikan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) dengan partisipasi masyarakat untuk memastikan program yang dihasilkan sesuai kebutuhan nyata di lapangan (Thomas, 2017). Di Indonesia, peran perencana sosial semakin relevan dalam mendukung implementasi kebijakan sosial, seperti perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program perlindungan sosial lain, yang menekankan pentingnya analisis kebutuhan dan evaluasi keberlanjutan (Suharto, 2019). Penelitian terbaru juga menyoroti bahwa perencanaan sosial membutuhkan keterampilan lintas bidang mulai dari riset terapan, penilaian kebutuhan (*needs assessment*), hingga evaluasi dampak kebijakan untuk memastikan intervensi yang dirancang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Septiani & Ramdhani, 2021).

Bab ini berfokus pada tiga jenis perencanaan yang umumnya dilakukan oleh manajer organisasi: perencanaan dan evaluasi program, perencanaan operasional, dan perencanaan strategis atau jangka panjang untuk pertumbuhan dan pengembangan organisasi di masa mendatang. Dalam hal penerapan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial lansia diterapkan dengan penerapan teori Rothman yang memberikan gambaran umum tentang tiga model utama praktik pengorganisasian masyarakat yaitu melalui aksi sosial, pengembangan masyarakat, dan perencanaan sosial. Ia berpendapat bahwa model tersebut merupakan model yang berbeda dan dapat digunakan selama berbagai fase kampanye pengorganisasian.

Sejalan dengan penelitian M. Abdul Najib tahun 2020 di Panti Sosial Lansia "Cepiring" Kendal, ditemukan bahwa panti asuhan memiliki tujuan utama memberikan layanan yang terjamin guna mendukung pemenuhan kebutuhan hidup maupun sosial para lansia. Dalam pelaksanaannya, pekerja sosial menjalankan beragam peran mulai dari aktivis, mediator, konsultan, koordinator, hingga pendamping. Temuan tersebut menegaskan bahwa perencanaan sosial dapat menjadi langkah strategis untuk

meningkatkan kualitas layanan bagi lanjut usia. Dengan adanya program pelayanan yang disusun secara terencana, kebutuhan lansia dapat terpenuhi lebih tepat dan menyeluruh.

SIMPULAN

Dalam hal penerapan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial lansia diterapkan dengan penerapan teori Rothman yang memberikan gambaran umum tentang tiga model utama praktik pengorganisasian masyarakat yaitu melalui aksi sosial, pengembangan masyarakat, dan perencanaan sosial. Sehingga perencanaan sosial dapat dijadikan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial lansia. Sebab dengan adanya pelayanan sosial yang didasari atas perencanaan sosial tentunya kebutuhan lansia diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan yang seharusnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulian jurnal ini. Terkhusus kepada Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Sumatera Utara yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2020). Laporan statistik lanjut usia di Indonesia tahun 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Badan Pusat Statistik. (2022). Tren demografi lanjut usia Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Damanik, R. (2019). Pelayanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Jakarta: Prenada Media Group.

Fahrudin, A. (2018). Dasar-dasar kesejahteraan sosial. Bandung: Refika Aditama.

Najib, M. A. (2020). Peran panti dalam meningkatkan kesejahteraan lansia non-potensial (Studi di Panti Sosial Lansia "Cepiring" Kendal). Institutional Repository Universitas Walisongo.

Septiani, N., & Ramdhani, A. (2021). Perencanaan sosial berbasis kebutuhan komunitas: Kajian dan praktik implementasi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20(2), 145–160.

Sugiyono. (2020). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2019). Strategi pembangunan kesejahteraan sosial & pemberdayaan masyarakat. Bandung: Refika Aditama.

Suharto, E. (2020). Panduan praktis analisis kebijakan publik di bidang sosial. Bandung: Alfabeta.

Thomas, J. (2017). Contemporary perspectives on social planning: Theory and application. New York: Routledge.

United Nations. (2018). COFOG: Klasifikasi fungsi pemerintahan. New York: United Nations Publishing.